



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 04 TAHUN 2008**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BALANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, perlu mengatur pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
dan  
BUPATI BALANGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Balangan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.
7. Kepala adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

**BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

### **Pasal 3**

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 4**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- b. perumusan kebijakan pembinaan personal ;
- c. perumusan kebijakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. perumusan kebijakan penegakan peraturan perUndang-undangan daerah;
- e. koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. koordinasi pelaksanaan penegakan peraturan perUndang-undangan daerah;

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pembinaan Personal, Koordinasi dan Pengawasan Operasional;
  - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - d. Seksi Penegakan Peraturan PerUndang-undangan Daerah; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol, ketatalaksanaan dan pelaporan.

### **Pasal 8**

Seksi Pembinaan Personal, Koordinasi dan Pengawasan Operasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas personal Satuan Polisi Pamong Praja serta pengkoordinasian dan pengawasan dalam operasional tugas-tugas.

### **Pasal 9**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

### **Pasal 10**

Seksi Penegakan Peraturan PerUndang-undangan Daerah mempunyai tugas membina dan melaksanakan penegakan peraturan perUndang-undangan daerah.

## **BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 11**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur sesuai dengan Peraturan PerUndang-undangan.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 12**

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

### **Pasal 13**

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

### **Pasal 14**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.

### **Pasal 15**

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 16**

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lainnya.

### **Pasal 17**

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 16 didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

## **BAB VI PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONERING**

### **Pasal 18**

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Polisi Pamong Praja yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. Berijazah sekurang-kurangnya SLTA dan atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a);
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 Cm untuk laki-laki dan 155 Cm untuk perempuan;
- d. Umur sekurang-kurangnya 21 tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

### **Pasal 19**

- (1) Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :
  - a. Alih tugas;
  - b. Atas permohonan yang bersangkutan;
  - c. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
  - d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak otomatis diberhentikan sebagai PNS.
- (3) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai PNS yang melanggar disiplin PNS diberikan sanksi sesuai ketentuan disiplin PNS.
- (4) Peraturan disiplin Polisi Pamong Praja berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

### **Pasal 20**

Pengisian jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diutamakan diisi oleh pejabat fungsional Polisi Pamong Praja.

### **Pasal 21**

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis dan fungsional berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

### **Pasal 22**

Eselonering Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala adalah jabatan struktural Eselon III a;
- b. Kepala Sub Bagian dan Seksi adalah jabatan Eselon IV a.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 23**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) kepada Satuan Polisi Pamong Praja dapat diberikan bantuan lain yang sah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 24**

Uraian tugas unsur-unsur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan hal-hal lain sepanjang mengenai pelaksanaannya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 25**

Peraturan daerah ini efektif berlaku sejak pelantikan.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 26**

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Balangan berkenaan dengan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 27**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 18 Juli 2008

**BUPATI BALANGAN,**

**Ttd**

**H. SEFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 18 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

**Ttd**

**H. M. RIDUAN DARLAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2008  
NOMOR 04**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2008  
  
TENTANG  
  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BALANGAN**

**I. UMUM.**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkannya Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Maka oleh karena itu organisasi perangkat daerah Kabupaten Balangan perlu ditata dan disesuaikan kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut.

Untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

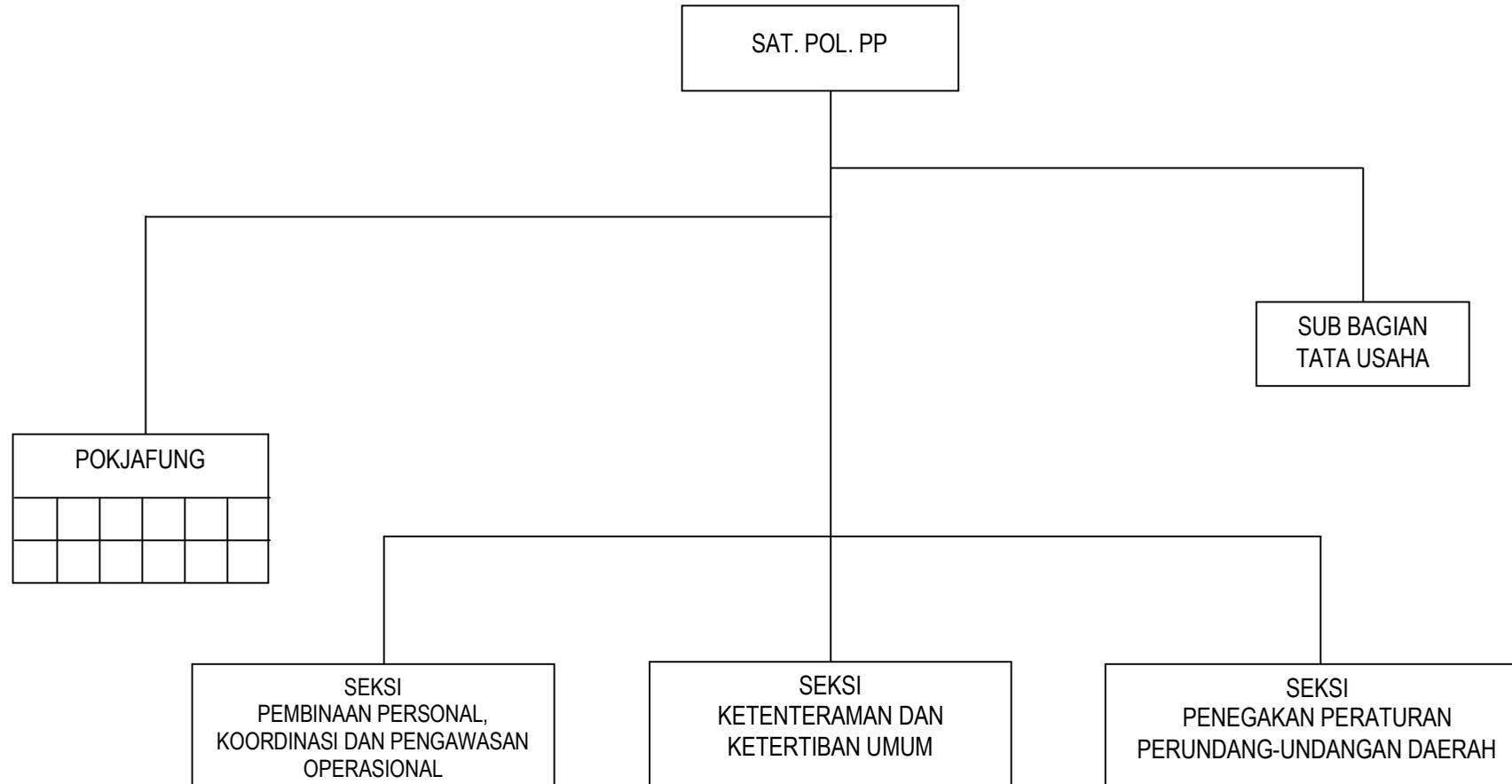
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran strategis dalam membantu Pemerintah Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, Oleh karena itu, disamping menegakkan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya seperti Peraturan dan Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 27 cukup jelas

### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 45**



BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE